

**EFEKTIVITAS PENERBITAN  
SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN  
DALAM PENGELOLAAN IKAN  
DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU**

Muhammad Fachrurrozi Anwar  
NPP. 29.1652  
*Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku*  
*Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*  
Email: mfachrurrozi24@gmail.com

**ABSTRACT (in english)**

**Problem Statement/Background (GAP):** The problem behind the implementation of this research is that marine and fishery resources in Maluku province are very abundant but their management is not optimal because there are still many Fish Processing Units that do not have a Processing Feasibility Certificate (SKP) so that their production does not can be distributed outside the region or abroad. This research is entitled "Effectiveness of Issuance of Feasibility Certificate of Processing in Fish Management in Ambon City, Maluku Province". **Purpose:** This research was conducted in order to find out and describe the effectiveness of Issuance of Processing Feasibility Certificates as measured by Productivity, Quality or Quality, Efficiency, Flexibility and Satisfaction. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research, which is a type of research that is intended to explore and clarify a phenomenon or social reality and then draw a general conclusion as a solution to a specific problem. The data collection techniques are by conducting observations, interviews and documentation. **Result:** The results of this study indicate that the issuance of a Processing Feasibility Certificate is very effective in improving fish management, but there are still many Fish Processing Units that do not yet have a Processing Feasibility Certificate which makes the processing results cannot be distributed outside the area which makes fish management not optimal. **Conclusion:** Researchers can conclude that the Processing Feasibility Certificate (SKP) is very effective in improving fish management.

**Keywords:** Effectiveness, Issuance, Certificate of Feasibility Processing

## ABSTRAK (in bahasa)

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya penelitian ini adalah sumber daya kelautan dan perikanan di provinsi maluku yang sangat melimpah namun dalam pengelolaannya belum maksimal dikarenakan masih banyak Unit Pengolahan Ikan yang belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sehingga hasil produksinya tidak dapat di distribusikan ke luar daerah maupun ke luar negeri. Penelitian ini berjudul “Efektivitas Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Dalam Pengelolaan Ikan Di Kota Ambon Provinsi Maluku”. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai Efektivitas Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang diukur dari Produktivitas, Mutu atau Kualitas, Efisiensi, Fleksibilitas dan Kepuasan. **Metode:** penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial kemudian ditarik suatu kesimpulan umum sebagai pemecahan permasalahan yang bersifat khusus. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan sangat efektif dalam meningkatkan pengelolaan ikan, namun masih banyak Unit Pengolahan Ikan yang belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang membuat hasil pengolahannya tidak dapat di distribusikan keluar daerah yang membuat pengelolaan ikan belum bisa dikatakan maksimal. **Kesimpulan:** Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sangat efektif dalam meningkatkan pengelolaan ikan.

**Kata kunci:** Efektivitas, Penerbitan, Sertifikat Kelayakan Pengolahan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Semua negara di dunia sepakat untuk mengembangkan sumberdaya sektor kelautan dan perikanan di masing-masing Negara dengan tujuan utama untuk menyelamatkan ekosistem lautan dunia dari berbagai kerusakan, dan semua negara sepakat kalau masih membutuhkan sumberdaya dari laut. Sumberdaya laut merupakan sumber kehidupan yang tidak bisa digantikan oleh daratan, semua sumberdaya alam yang ada di laut sudah sejak lama menjadi penunjang kebutuhan hidup masyarakat dunia.

Provinsi Maluku memiliki kekayaan alam dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Sejak dulu dunia internasional mengenal Maluku sebagai “Spice Island” atau pulau rempah-rempah. Maluku adalah tanah surga penghasil cengkeh dan pala, karena kekayaan rempah inilah yang membuat bangsa-bangsa eropa datang dan menguasai Maluku, diawali oleh Portugis, Spanyol dan Belanda. Selain rempah yang menjadi sumberdaya unggulan di Maluku, dengan memiliki perairan yang luas menjadikan sektor kelautan dan perikanan juga menjadi salah satu sumberdaya unggulan di Maluku. Sebagai daerah yang dominan wilayahnya adalah pesisir dan laut menjadikan Provinsi Maluku memiliki peluang besar untuk berkembang dari sektor kelautan dan perikanan.

Perairan Maluku memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya yang besar sehingga menjadikan Provinsi Maluku sebagai salah satu daerah dengan sektor perikanan tangkap terbesar di Indonesia. Dari 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang ada di Indonesia, Provinsi Maluku memiliki 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu Laut Seram dan sekitarnya (WPP 715), Laut Banda dan sekitarnya (WPP 714) dan Laut Arafura dan sekitarnya (WPP 718). Simpulkan bahwa Provinsi Maluku memang memiliki sumber ikan yang sangat melimpah, Provinsi Maluku menyumbang 37,23% hasil kelautan dan perikanan dari total hasil kelautan dan perikanan Nasional.

Kota Ambon adalah ibukota dan kota terbesar di Provinsi Maluku. Kota Ambon di dirikan oleh bangsa Portugis. Sejak zaman penjajahan VOC dan Belanda, Kota Ambon berkembang cepat menjadi pusat perdagangan rempah dan pusat pembudidayaan dan menjadikan Kota Ambon sebagai salah satu kota penting di Nusantara hingga saat ini berkedudukan sebagai ibukota Provinsi, Kota Ambon memiliki luas daratan 359,42 km<sup>2</sup> dan luas lautan 17,55 km<sup>2</sup>, dengan memiliki lautan yang cukup luas membuat banyak masyarakat Kota Ambon yang menjadikan sumber kekayaan alam laut sebagai mata pencaharian mereka khususnya di sektor perikanan. Dalam mengelola dan meningkatkan sumberdaya alam di daerah Maluku khususnya di Kota Ambon, pemerintah Kota Ambon tentu memberikan pelayanan yang baik untuk mendukung masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam di Kota Ambon. Pelayanan pada umumnya adalah aktifitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Sektor perikanan memegang peran penting dalam perekonomian daerah Maluku khususnya di Kota Ambon, laut yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah tentunya memberikan dampak pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat Kota Ambon, sektor perikanan menjadi sumber pendapatan bagi para nelayan yang kemudian hasilnya di kelola oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI). Unit Pengolahan Ikan (UPI) adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas pengolahan ikan.

Sumberdaya laut sering dikatakan sebagai barang umum (good common) yang bersifat open akses, artinya setiap orang dapat menangkap ikan dan menggunakan sumberdaya kelautan dan perikanan kapan saja dan dimana saja. Keadaan ini dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan serta dapat menimbulkan konflik antar orang yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh karena itu perlu adanya regulasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, Hal tersebut telah diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Berdasarkan Data Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang bersumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku bahwa tidak semua Unit Pengolahan Ikan (UPI) dapat mendistribusikan hasil pengolahan ikan keluar dari daerah Maluku. Diperlukannya Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sebagai persyaratan agar hasil dari pengolahan ikan dapat di distribusikan keluar dari daerah Maluku. Maka Dinas Kelautan Dan Perikanan Provisi Maluku memberikan pelayanan kepada Unit

Pengolahan Ikan (UPI) dengan merekomendasikan penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) agar para Unit Pengolahan Ikan (UPI) dapat memaksimalkan hasil pengolahan ikan dari sumberdaya alam yang melimpah dengan cara mendistribusikan hasil pengolahan ikan di daerah Maluku kedaerah lain dan di distribusikan keluar negeri (ekspor), dengan mendistribusikan hasil pengolahan ikan keluar dari daerah Maluku tentu akan meningkatkan nilai jual ikan dan meningkatkan pendapatan terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI).

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks implementasi, strategi maupun kebijakan. Penelitian Pujiono, Dewi Sulistianingsih dan Laga Sugiarto berjudul “Implementasi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) Produk Ikan Bandeng di Indonesia” (Pujiono dkk, 2018), menemukan bahwa Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) perikanan dan produk olahan ikan adalah sarana untuk meningkatkan kualitas produk olahan ikan. Selanjutnya penelitian enelitian Selly Kartika yang berjudul “Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Ekosistem di Pantura Barat Provinsi Jawa Tengah” menemukan bahwa Model pengelolaan secara konvensional (Traditional Based Fisheries Management, Community Based Fisheries Management dan Co-management) dinilai masih belum efektif dalam mengelola sumberdaya perikanan (Kartika, 2010). Penelitian Sonny Koeshendrajana dengan judul “Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Perikanan Tangkap di Danau Toba Paska Introduksi Ikan Bilih” penelitian ini menemukan bahwa Ikan bilih yang ditebarkan ke danau Toba 2.840 ekor pada tahun 2003 telah mampu memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar danau Toba (Koeshendrajana, 2011).

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Dalam proses penelitian, melihat dan membandingkan hasil penelitian sebelumnya sangatlah penting. Walaupun terdapat perbedaan masalah maupun teori yang digunakan, namun penelitian sebelumnya ini membantu peneliti menemukan solusi terhadap penelitian ini, sehingga dapat di jadikan suatu perbandingan ataupun acuan yang dapat menjelaskan tentang perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu. Dari ketiga penelitian sebelumnya yang pernah diteliti, semua berkaitan dengan pengelolaan ikan namun tetap memiliki perbedaan mulai dari lokasi penelitian maupun sub unsurnya yang dimana peneliti sebelumnya yaitu terkait kebijakan, strategi maupun implementasi. Pada penelitian ini yaitu “Efektivitas Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Dalam Pengelolaan Ikan Di Kota Ambon Provinsi Maluku” peneliti memfokuskan tentang bagaimana efektivitas dalam proses penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan dalam pengelolaan ikan. Dari penelitian-penelitian di atas terlihat jelas bahwa penelitian tentang “Efektivitas Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Dalam Pengelolaan Ikan di Kota Ambon Provinsi Maluku” masih layak untuk diteliti. Karena sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan hasil penelitian yang membahas tentang permasalahan ini.

## **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produktivitas penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan dalam pengelolaan ikan, bagaimana kualitas pengolahan ikan melalui penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, keefisienan sertifikat kelayakan pengolahan dalam pengelolaan ikan, fleksibilitas pengelolaan ikan melalui sertifikat kelayakan pengolahan, dan mengetahui kepuasan terhadap penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial kemudian ditarik suatu kesimpulan umum sebagai pemecahan permasalahan yang bersifat khusus. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap beberapa informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Kepala Bidang PBP2HP, Pembina Mutu Daerah, Manager Unit Pengolahan Ikan, dan Quality Control Unit Pengolahan Ikan. Adapun analisisnya menggunakan teori efektivitas yang digagas oleh Gibson At All Dan Stress dalam Sumaryadi yang diketahui ada 5 dimensi. dimana konsep yang dipakai terkait bagaimana menjelaskan bahwa efektivitas dibuktikan dengan tercapainya target atau sasaran, dengan keinginan yang dilakukan secara bersama sehingga dikatakan efektif ditunjukkan dengan taraf pencapaian target atau sasaran. Efektivitas bertujuan pada sejauh mana organisasi dapat menjalankan aktivitas dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Jika pencapaian tersebut mendekati dengan sasaran dan target maka mendekati efektivitas.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis bahwa Efektivitas terwujud apabila proses pelaksanaan menunjukkan kesesuaian harapan dengan kenyataan. Efektivitas dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai sejauh mana pelaksanaan berjalan, dan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sehingga apabila tercapai efektivitas dalam pelaksanaan, maka pelaksanaan suatu program ataupun sistem telah mencapai tujuan.

### **3.1. Efektivitas Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Dalam Pengelolaan Ikan**

Untuk mengetahui Efektivitas Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dalam pengelolaan ikan maka diperlukannya data dan informasi dari Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Berikut adalah data Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang sudah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) :

**Tabel 1.1**  
**Unit Pengolahan Ikan Memiliki SKP**

No	Unit Pengolahan Ikan	Alamat	Keterangan
1.	PT. HARTA SAMUDERA	<i>Jl. Sultan Hasanudin Komplek PPN Tantai Ambon</i>	Memiliki SKP
2.	PT. PERIKANAN NUSANTARA	<i>Jl. Kapt. Piere Tendean Galala, Ambon</i>	Memiliki SKP
3.	PT. SAMUDRA SAKTI SEPAKAT	<i>Desa Laha Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon</i>	Memiliki SKP
4.	PT. MINA MALUKU SEJAHTERA	<i>Komplek. PPI Eri, Kel Silale, Kec. Nusaniwe</i>	Memiliki SKP
5.	PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA	<i>Komplek TNI-AU Pattimura Laha, Ambon</i>	Memiliki SKP
6.	PT. TRI Satria SAMUDERA	<i>Jl. Sultan Hasanudin Komplek PPN Tantai Ambon</i>	Memiliki SKP
7.	PT. MALUKU PRIMA MAKMUR	<i>Jl. Dr. Leimena Nomor 8.A – Tawiri. Kec Teluk Ambon</i>	Memiliki SKP
8.	PT. INTI MAS SURYA	<i>Jl. Sultan Hasanudin Komplek PPN Tantai Ambon</i>	Memiliki SKP
9.	CV. DIAN SAMUDRA	<i>Jl. Sultan Hasanudin Komplek PPN Tantai Ambon</i>	Memiliki SKP
10.	PT. CEMERLANG LAUT AMBON	<i>Jl. Ir. M. Puttuhena Waiyame, Teluk Ambon</i>	Memiliki SKP
11.	PT. PATRIA PERIKANAN LESTARI	<i>Jl. Sultan Hasanudin Komplek PPN Tantai Ambon</i>	Memiliki SKP
12.	PT. MINA USAHA HARAPAN	<i>Jl. Sultan Hasanudin Komplek PPN Tantai Ambon</i>	Memiliki SKP

*Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku*

Untuk mengetahui Efektivitas Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dalam pengelolaan ikan maka diperlukannya data produksi ikan dari Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang sudah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan data produksi dari Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mendapatkan data produksi ikan dari Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang sudah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yaitu PT. HARTA SAMUDERA dan PT. MULTI MINA PERSADA, serta peneliti juga mendapatkan data produksi ikan dari (UPI) yang belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yaitu PT. OAS ANUGERAH SAMUDRA.

**Tabel 1.2**  
**Data Produksi Ikan 2021**

Bulan	JumlahProduksi (Kg)		
	PT. HartaSamudera	PT. Multi MinaPersada	PT. OasAnugerah Samudra
Januari	16.723,51	19.230,0	3.179,6
Februari	3.064,52	4.149,9	3.352,1
Maret	6.419,32	8.156,3	5.691,8
April	15.959,88	12.708,2	5.732,4
Mei	8.328,14	10.985,4	3.643,7
Juni	11.777,43	12.403,7	3.542,2
Juli	10.722,48	8.771,9	3.916,2
Agustus	25.999,88	11.630,5	4.117,1
September	15.665,62	10.744,8	3.431,9
Oktober	31.053,25	16.575,2	5.812,5
November	45.944,63	20.928,6	5.399,3
Desember	17.683,83	10.298,6	3.892,9
<b>Total</b>	<b>209.342,49</b>	<b>146.538,1</b>	<b>51.711,7</b>

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku

Keberhasilan dari Keefektivitasan Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dalam meningkatkan pengelolaan ikan di Kota Ambon melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku yang di teliti oleh peneliti dengan menggunakan teori Efektivitas yang di kemukakan oleh Gibson At All Dan Stress dalam Sumaryadi yang diketahui ada 5 dimensi. Fokus dalam penelitian ini berdasarkan ke 5 dimensi tersebut yakni sebagai berikut :

- 1) Produktivitas, Produktivitas suatu organisasi membutuhkan proses-proses yang terstruktur dan kemampuan yang memadai untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai tujuan yang dimiliki suatu organisasi. Kelancaran dalam proses produksi tersebut mengukur efektivitas kegiatan-kegiatan yang dijalankan dalam organisasi tersebut. Ketercapaian dari penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) telah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya Mutu dan Kualitas dari hasil pengolahan ikan yang sudah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) serta meningkatnya pendistribusian ikan sehingga meningkatkan pendapatan, terdapat perbedaan ketepatan dan kecepatan dalam pengolahan ikan, antara pengolahan yang sesuai dengan standar Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan pengolahan yang tidak sesuai dengan standar Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Hasil pengolahan yang sesuai dengan standar Sertifikat Kelayakan Pengolahan lebih baik walaupun waktu yang digunakan sedikit lebih lama.
- 2) Mutu atau Kualitas, Kualitas suatu produk berdampak pada efektivitas. Hal ini disebabkan karena baik atau buruknya kualitas produk tersebut t dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kualitas suatu organisasi. Jika produk tersebut memiliki kualitas yang baik, maka masyarakat akan memilih untuk menjadi konsumen tetap sehingga produk yang dihasilkan dapat dinilai sudah efektif. Kualitas dari hasil pengolahan yang sesuai dengan standar Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sangat baik karena hasil pengolahannya telah terjamin mutu dan kualitasnya. kemampuan SDM atau pegawai di Unit Pengolahan Ikan yang telah memiliki

Sertifikat Kelayakan Pengolahan kemampuannya dalam mengolah ikan sudah baik karena mereka telah melaksanakan pelatihan dalam pengolahan ikan agar meningkatkan mutu dan kualitas dari hasil pengolahannya.

- 3) Efisiensi, dimana kegiatan produksi untuk mengeluarkan produk harus seimbang dengan masukan yang didapatkan dari hasil penggunaan konsumen. Hal ini dipengaruhi oleh proses dan siklus diantara keduanya. Hasil produksi harus digunakan seluruhnya oleh konsumen dan tidak ada produk yang tidak terpakai sehingga efisiensi dapat tercapai. pengolahan ikan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang sudah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) lebih baik dari pada yang belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), karena mutu dan kualitasnya telah terjamin serta dapat di distribusikan keluar daerah. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ini sangat mampu untuk meningkatkan pengelolaan ikan, karena dengan adanya Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) mutu dan kualitas dari hasil pengolahan ikan meningkat dan pendistribusiannya pun meningkat sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
- 4) Fleksibilitas, Suatu organisasi harus bisa menjaga dan konsisten dalam memberikan suatu pelayanan dan menjaga kesesuaian fungsi dengan tugas yang telah diberikan kepada masing-masing. Hal ini menjadi tantangan bagi suatu organisasi untuk menyelesaikan masalah-masalah terutama pada saat-saat yang sulit. Pemanfaatan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dalam mendapatkan izin *ekspor* dapat di katakan telah tercapai. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) maka para Unit Pengolahan Ikan (UPI) dapat mendistribusikan hasil pengolahannya keluar negeri (*ekspor*) dan tidak ada alternatif lain untuk mendapatkan izin *ekspor* hasil pengolahan ikan selain menggunakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Dalam Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat sehingga dalam Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) belum optimal. Hambatan yang dihadapi yaitu Sarana dan Prasarana serta Kemampuan SDM menjadi faktor penghambat dalam Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Namun ada beberapa perusahaan atau Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang berhasil mengatasi hambatan-hambatan tersebut sehingga membuat perusahaan mereka telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
- 5) Kepuasan, Penilaian yang diutarakan dari perasaan masyarakat dan pelanggan terhadap *output* yang dihasilkan dari rangkaian proses dan kegiatan suatu organisasi merupakan kriteria penting dalam penilaian efektivitas suatu organisasi. *Output* yang dihasilkan tersebut dapat berupa produk serta manfaat yang diperoleh masyarakat akan hal tersebut dalam kehidupan. Respon Unit Pengolahan Ikan (UPI) terhadap penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang merasa terbantu dengan adanya penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) karena dengan adanya penerbitan tersebut pendistribusian ikan mereka menjadi meningkat dan juga meningkatkan pendapatan mereka. Serta dapat dilihat juga pada data di Tebel 1.1 diketahui bahwa Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang sudah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) menghasilkan produksi ikan 146.538 ton hingga 209.342 ton, jauh lebih banyak dari Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang hanya menghasilkan produksi 51.711 ton. Kepuasan yang dirasakan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dapat dikatakan sudah puas. Hal ini dapat dilihat dari Unit Pengolahan Ikan yang merasa puas karena meningkatnya mutu dan kualitas dari hasil pengolahan mereka serta meningkatnya



permintaan konsumen terhadap perusahaan karena konsumen menyukai produk yang mereka hasilkan.

### 3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Efektivitas dalam penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, dimana produktivitas SKP sangat mampu dalam meningkatkan pengelolaan ikan karena meningkatkan mutu dan kualitas serta pendistribusian ikan dan pengolahan ikan yang sesuai dengan SKP menggunakan waktu sedikit lebih lama, namun hasilnya maksimal. Keefisienan Proses pengelolaan ikan pada UPI yang sudah memiliki SKP lebih baik dari pada UPI yang belum memiliki SKP dan tujuan dari penerbitan SKP telah tercapai, karena dengan adanya SKP meningkatkan mutu dan kualitas serta pendistribusian ikan sehingga meningkatkan pendapatan. Sedangkan fleksibilitas, dimana dengan adanya SKP maka UPI dapat mendistribusikan hasil pengolahannya keluar negeri (ekspor). Kepuasan, UPI merasa terbantu dengan adanya SKP karena meningkatkan mutu dan kualitas serta pendistribusian ikan. UPI merasa puas dengan adanya SKP karena meningkatnya permintaan konsumen sehingga meningkatkan juga pendapatan sama halnya dengan temuan Pujiono dkk (Pujiono, 2018). Proses Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) belum optimal, karena masih terdapat hambatan. Hambatan yang dihadapi yaitu Sarana dan Prasarana serta kemampuan SDM menjadi faktor penghambat dalam Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Namun ada beberapa perusahaan atau Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang berhasil mengatasi hambatan-hambatan tersebut sehingga membuat perusahaan mereka telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).

## IV. KESIMPULAN

Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Dalam Pengelolaan Ikan Di Kota Ambon dengan menggunakan teori Efektivitas yang di kemukakan oleh Gibson At All Dan Stress dalam Sumaryadi yang diketahui ada 5 dimensi yaitu Produktivitas, Mutu atau Kualitas, Efisiensi, Fleksibilitas dan Kepuasan, dimana Produktivitas dalam penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dapat dikatakan sudah baik atau sudah produktif. Hal ini dapat dilihat dari indikator pada dimensi produktivitas yang telah tercapai yaitu, ketercapaian tujuan penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), dengan adanya Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) membuat peningkatan terhadap mutu dan kualitas dari hasil pengolahan ikan serta meningkatkan pendistribusian ikan dari Kota Ambon ke daerah bahkan keluar negeri (ekspor). Dimensi fleksibilitas ini telah tercapai yaitu, Pemanfaatan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dalam mendapatkan izin ekspor, dengan adanya Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) maka para Unit Pengolahan Ikan (UPI) dapat mendistribusikan hasil pengolahannya keluar negeri (*ekspor*). Respon Unit Pengolahan Ikan (UPI) terhadap penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Unit Pengolahan Ikan yang merasa terbantu dengan adanya penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) karena dengan adanya penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pendistribusian ikan mereka menjadi meningkat dan juga meningkatkan pendapatan mereka. Mutu dan Kualitas yang telah tercapai yaitu, hasil pengolahan ikan yang maksimal, dengan adanya Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) membuat peningkatan terhadap mutu dan kualitas dari hasil pengolahan ikan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan efektivitas penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan dalam pengelolaan ikan di Kota Ambon Provinsi Maluku dapat menemukan hasil yang lebih mendalam.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Efektivitas Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Effendi, M. S. dan S. (1995). *Metode Penelitian Survey*. LP3ES.
- Ekasari, R. (2020). *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. AE Publishing.
- Gibson, I. dan D. (2006). *Organisasi: Perilaku Struktur Proses*. Erlangga.
- Gulo, W. (2000). *Metodologi Penelitian*. PT Grasindo, Anggota IKAPI.
- Hasan Pambudi. (1981). *Dasar Dan Teknik Penerbitan Buku*. Sinar Harapan.
- Indarto, N. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFE.
- Khasan, E. (2010). *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. CV. Indra Prahasta.
- Lupiyoadi, Rambatan dan Ikhsan, R. B. (2015). *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Salemba Empat.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT. Refika Aditama.
- Moleong. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja.
- Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pasolong, H. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Trim, B. (2009). *Taktis Menyunting Buku*. Maximalis Imprint Salamadani.

## B. Jurnal

Pujiono, Dewi Sulistianingsih dan Laga Sugiarto. (2018). Implementasi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) Produk Ikan Bandeng Indonesia. *Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine*.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pengujian Atau Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan

## C. Skripsi

Shelly Kartika. (2010). STRATEGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN BERBASIS EKOSISTEM DI PANTURA BARAT PROVINSI JAWA TENGAH. Universitas Diponegoro Semarang.

## D. Sumber-Sumber Lain

<https://www.simulasikredit.com/15-negara-penghasil-ikan-terbesar-di-dunia/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Ambon](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Ambon)